**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL**

(Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Tahun 2014-2017)

Wan Rahmat Aulia

15061057

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

ABSTRAK

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap Belanja Modal (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2017)”. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal baik secara persial maupun secara simultan. Penelitian ini merupakan penelitian komperatif. Data Laporan Realisasi APBD diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

 Hasil penelitian secara persial menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian secara simultan menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU), secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Modal.

***ABSTRACT***

"The Effect of Local Revenue (PAD), and the General Allocation Fund (DAU), on Capital Expenditures (Case Study on District / City Governments in West Java Province 2014-2017 Period)". Essay. Accounting Study Program. Faculty of Economics. Mercu Buana University Yogyakarta.

This study aims to determine the effect of Regional Original Revenue (PAD), and the General Allocation Fund (DAU) on Capital Expenditures both persially and simultaneously. This research is a comparative study. APBD Realization Report data obtained from the official website of the Directorate General of Fiscal Balance (www.djpk.kemenkeu.go.id). The method used to analyze the data in this study using multiple linear regression analysis methods.

The results of the research show that the Regional Original Revenue (PAD), and the General Allocation Fund (DAU) affect capital expenditure. The results of the study simultaneously showed that the Regional Original Revenue (PAD), and the General Allocation Fund (DAU), simultaneously had a positive effect on capital expenditure.

***Keywords:*** Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU)

Capital Expenditures

1. **PENDAHULUAN**

 Daerah yang berada di Wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan yang ada pada di setiap daerah. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan Pemerintah Daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengelola keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang disebut sebagai otonomi daerah. Dengan itu, untuk mengatur segala kas milik daerah yang dipergunakan dalam pelayanan publik di daerah dapat diatur dengan mudah oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dituntut kemandirian Pemerintah Daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Anggaran belanja rutin maupun pembangunan tidak lagi berasal dari pusat, tetapi lebih banyak berasal dari sumber-sumber daerah sendiri sehingga tanggungjawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan otonomi daerah di satu sisi disambut baik oleh sebagian Pemerintah Daerah (Provinsi), namun disisi lain justru direspon sebaliknya dikarenakan belum siapnya daerah memasuki era ini karena rendahnya kapasitas fiskal daerah (Adi, 2012).

 Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak atau retribusi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi yang dilakukan menggunakan beban APBD. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAU, DAK dan DBH) dan Pinjaman Daerah. Sumber dana bagi daerah tersebut langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat (Halim, 2009). Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah sering diukur dan digunakan untuk menentukan kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sehingga besar kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Pajak dan Retribusi Daerah (yang merupakan komponen penyumbang PAD terbesar) seharusnya mampu membiayai Belanja Pemerintah Daerah . Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah adalah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yaitu dengan memberikan proporsi alokasi belanja modal yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang dianggap produktif (Nugroho, 2012 dalam Sugiarthi dan Supadmi, 2014) dalam jurnal Ejurnal Akuntansi Universitas Udayana.

 Dalam menangani pemberian transfer atau bantuan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terdapat campur tangan Pemerintah Pusat. Hal ini yang menjadi penyebab munculnya permasalahan di daerah, seperti masih adanya sikap arogan Pemerintah Pusat yang hingga kini belum menyerahkan kewenangan pengelolaan sumber daya alam kepada daerah. Untuk menghitung berapa penghasilan yang didapati dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah seharusnya Pemerintah Pusat tidak menyulitkan departemen keuangan dalam melakukannya tugasnya. Pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat akan dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya semakin meningkat, dan dengan adanya insfrastruktur yang memadai akan mendorong atau menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Bertambahnya Pendapatan Asli Daerah akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan Belanja Modal (Purwanto, 2013).

 Menurut data dari laporan keuangan laporan pusat (LKPP) tahun 2010, DAU merupakan bagian terbesar dari Dana Perimbangan, yaitu sekitar 3,17% dari produk domestic bruto (PDB). Proporsi Dana Perimbangan semakin lama semakin meurun dalam anggaran pemda sejalan dengan peningkatan penerimaan PAD walaupun masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Pada tahun 2017 persentase Dana Perimbangan adalah 78% dari total pendapatan daerah sedangkan pada tahun 2010 turun menjadi 73% (DPJK-Kemenkeu, 2011) Dana Alokasi umum masih tetap menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran pemerintah daerah.

 Daya Saing Provinsi Jawa Barat kini menduduki nomor dua Nasional. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik. sejak 2013, Ekonomi di Jawa Barat menunjukkan tren pertumbuhan. Salah satu indikatornya tercemin PAD di Jawa Barat tersebut yang terus naik dari RP 12,4 triliun menjadi RP 17,04 triliun pada tahun 2016. Provinsi Jawa Barat berhasil merealisasikan 101,3% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah tersebut terdiri atas pajak daerah RP 15 triliun, retribusi daerah 73 juta, laba BUMD dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan RP 332 juta, serta sumber PAD lainnya sebesar RP 919 juta. Namun, Pemprov Jawa Barat hanya menargetkan PAD sebesar RP 16,52 triliun pada tahun 2017, turun 3,04% dari realisasi tahun sebelumnya.

 Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 24 Tahun 2005). Belanja Modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Dari konsep Multi-Term Expenditure Framework (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefulness) dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah (budget capability) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001). Pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar sama dengan kebutuhan daerah dan harus mempertimbangkan penerimaan asli yang diterima jadi jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan belanja modal, maka pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali potensi daerahnya sebesar-besarnya (Nuarisa, 2013).

 Reformasi anggaran dalam konteks otonomi memberikan paradigma baru terhadap anggaran daerah yaitu bahwa anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan umum, yang dikelola dengan berdaya guna dan berhasil guna serta mampu memberikan tranparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran. Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 24 Tahun 2005).

 Pemanfaatan anggaran belanja lebih baik di alokasikan untuk hal-hal produktif dan program layanan publik, misalnya untuk pembangunan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari Belanja Modal, yaitu harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Halim, 2008). Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran tersebut ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Dengan meningkatkan investasi modal yang tinggi diharapkan juga mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah. Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama ini merupakan sumber pendapatan daerah yang dominan, oleh karena itu perlu ditingkatkan penerimaan dalam Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap upaya pembangunan, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang tediri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga dana transfer dari Pemerintah Pusat harus digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.

 Setiap Pemerintah Daerah (Provinsi) mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing-masing sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH) untuk masing-masing daerah. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan data selama 4 tahun terakhir dengan mengambil data yang ada pada setiap Provinsi yang terdapat di Jawa Barat dangan tahun anggaran 2014-2017, dengan judul: “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL”

(Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2014 – 2017)

1. **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**
2. **LANDASAN TEORI**
3. **APBD**

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 17 Ayat 1 APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan negara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

1. **Belanja Modal**

 Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 (satu) tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

 Menurut Darise (2006:145) menyatakan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

1. **Dana Alokasi Umum**

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalan negeri neto dan ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

1. **HIPOTESIS**
2. **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengalokasian Belanja Modal**

Pasal 1 ayat 13 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah Adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Otonomi daerah selain memberikan peluang kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri juga menuntut untuk mampu memenuhi segala tuntutan dan aspirasi masyarakat daerahnya. Untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, Pemerintah Daerah memerlukan infrastruktur yang memadai. Pembelanjaan ini berupa pembelanjaan aset tetap yang dikategorikan sebagai Belanja Modal sehingga daerah dituntut untuk memaksimalkan pemanfaatan segala potensi yang dimiliki. Hasil penelitian Nurzen dan Riharjo (2016) memperoleh bukti empiris, dengan menyatakan Pendapatan Asli daerah berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Besarnya Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan Belanja Modal. Jika Pemerintah Daerah akan mengalokasikan Belanja Modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga dapat mempengaruhi pemerintah dalam pengalokasian Belanja Modal.

Hasil penelitian Hermawan, Made dan Wirshandono (2016) semakin memperkuat bukti empiris tersebut, dengan menyatakan pendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Selain itu, temuan tersebut mengindikasi bahwa besarnya PAD menjadi salah satu fakor dalam pengalokasian Belanja Modal. Hal ini sesuai dengan PP dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa PBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan, sehingga untuk meningkatkan Belanja Modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah harus menggali PAD yang sebesar-besarnya. Berdasarkan landasan teori dari beberapa hasil penelitian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

**2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal**

 Untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi salah satunya terdiri dari Dana Alokasi Umum. Pemerintah Daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui Belanja Modal (Ardhani, 2011). Hasil penelitian Erdy Adyatma dan Rachmawati Meita Oktaviani (2015) memperoleh bukti empiris bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan diserahkannya Dana Alokasi Umum kepada daerah sesuai prioritas daerah, idelanya dialokasikan untuk belanja yang dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

 Hasil penelitian Susi Susanti dan Heru Fahlevi (2016) semakin memperkuat bukti empiris tersebut, mereka menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa perilaku Belanja Daerah khususnya Belanja Modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan dari Dana Alokasi Umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka alokasi Belanja Modal juga meningkat, hal ini disebebkan karena daerah yang memiliki pendapatan daerah berupa Dana Alokasi Umum yang besar maka Belanja Modal akan meningkat. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

1. **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.**

Pada dasarnya, ada dua sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Setiap daerah memiliki jumlah penerimaan yang berbeda serta memiliki perbedaan dalam prioritas pembangunannya. Untuk mendukung progam pembangunan serta kinerja daerah, maka daerah dituntut untuk menyediakan fasilitas serta infrastruktur yang memadai. Pengeluaran tersebut berkaitan dengan Belanja Modal seperti pengadaan lahan, gedung, peralatan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja ini tentunya akan disesuaikan dengan besarnya penerimaan dari daerah yang bersangkutan. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku Belanja Modal mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang memberikan kontribusi sesuai dengan aspek masing-masing yang dibutuhkan oleh daerah untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan landasan teori diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)

berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

1. **METODE PENELITIAN**
2. **Jenis Penelitian**

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor, dan analisisnya menggunakan statistik.

1. **Lokasi Penelitian**

 Data penelitian diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)) periode 2015 - 2017. Sedangkan situs web resmi Kementerian Dalam Negeri yang beralamat di ([www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)) periode 2015 - 2017.

1. **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, (Sugiyono, 2013:90). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2013:118). Sampel pada penelitian ini sebanyak 27 Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengambilan sampel jenuh. Teknik pengambilan sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah sampel jenuh adalah sensus dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono,2013:96).

1. **Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data yaitu data kuantitaif dan data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ialah data sekunder. Dalam penelitian ini data diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)). Data bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang diunduh melalui situs web resmi Kementerian Dalam Negeri yang beralamat di ([www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)).

1. **Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh data yang relevan sehingga dapat dianalisis, maka diperlukan pengumpulan data dengan menggunakan data dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data-data yang berhubungan dengan penelitian

1. **Definisi Operasional**
2. **Belanja Modal**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Variabel ini diukur dari jumlah belanja modal yang ada di Laporan Realisasi APBD pada Provinsi Jawa Tengah.

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalamnya daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

1. **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).

1. **Metode Analisa Data**
2. **Statistik Deskriptif**

Menurut Sugiyono (2016:167) Statistik Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat melihat profil setiap variabel. Ukuran-ukuran statistik deskriptif dalam penelitian ini berupa jumlah data, jarak, minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

1. **Uji Asumsi Klasik**
2. **Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Imam Ghozali, 2011:160). Pada penelitian uji normalitas yang digunakan adalah uji statistik Kolmogrov-Smirnov. Jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan ditas 0,05 maka data residual terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal.

1. **Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali,2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara untuk mengetahui akankah terjadi Multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerancemengukur variabel-variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF karena VIF = 1/Tolerance. Nilai yang dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2011).

1. **Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model rergresi terjadi ketidaksamaan antara varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas atau mempunyai varians yang homogen. Jika suatu model regresi yang mengandung gejala heteroskedastisitas akan memberikan hasil prediksi menyimpang. Banyak metode untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas, tetapi untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan Uji Glejser (Ghozali, 2016:137). Metode ini meregresi variabel bebas terhadap absolut residual. Pengujian Glejser ini dilakukan dengan melihat tarif signifikansi 0,05, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai signifkansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

1. **Uji Autokorelasi**

Menurut (Ghozali :2013) autokorelasi bertujuan menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan menggunakan uji Run Test. Dalam pengujian ini didapatkan hipotesis jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan acak atau random (Ghozali, 2016:116). Pengujian run test digunakan untuk melihat apakah suatu data residual terjadi secara acak atau tidak dengan taraf signifikansi 0,05. Jika hasil dari pengujian ini diatas taraf signifikansi, maka persamaan regresi terbebas dari masalah autokorelasi.

1. **Model Regresi**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Tujuan penggunaan metode ini dilakukan adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Luas Wilayah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Belanja Modal. Menurut Sugiyono (2013:277) secara matematika, regresi linear berganda dari penelitian ini sebagai berikut :

**Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e**

1. **Uji Signifikansi**
2. **Uji Parsial (Uji t )**

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalan menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Apabila hasil dari output SPSS menunjukkan nilai signifikan < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan jika nilai signifikan > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. **Uji Simultan (Uji F)**

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:96). Cara untuk mengetahuinya yaitu dapat melihat nilai signifikansi hasil output SPSS, jika nilai Sig < 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sedangka jika nilai Sig > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Gambaran Umum Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan disitus resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)) dan Kementrian Dalam Negeri ([www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)). Objek dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Jumlah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat berjumlah 27 Kabupaten/Kota. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dengan jumlah sampel sebanyak 27 Kabupaten/Kota, maka jumlah penelitian keseluruhan menjadi 27 Kabupaten/Kota x 4 tahun = 108 sampel.

1. **Analisis Data**
2. **Statistik Deskriptif**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **N** | **Minimum** | **Maximum** | **Mean** | **Std. Deviation** |
| **PAD** | 107 | 32.473 | 2.292.176 | 522.910,09 | 512.336,556 |
| **DAU** | 107 | 216.677 | 2.163.439 | 1.016.206,98 | 450.303,993 |
| **BM** | 107 | 17.516 | 1.541.830 | 433.426,68 | 360.528,313 |
| **Valid N (listwise)** | 107 |  |  |  |  |

Sumber : Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa N merupakan jumlah dari data yang ada pada variabel. N untuk semua variabel mempunyai jumlah data yang sama yaitu 107.

Berdasarkan Tabel 4.1, Minimum merupakan nilai terkecil dari suatu variabel. Dapat diketahui nilai minimum Pendapatan Asli Daerah sebesar 32.473, Dana Alokasi Umum sebesar 216.677 dan Belanja Modal sebesar 17.516.

Berdasarkan Tabel 4.1, Maximum merupakan nilai terbesar dari suatu variabel. Dapat diketahui nilai maximum Pendapatan Asli Daerah sebesar 2.292.176, Dana Alokasi Umum sebesar 2.163.439 dan Belanja Modal sebesar 1.541.830.

Berdasarkan Tabel 4.1, Mean merupakan rata-rata dari data yang dapat dicari dengan cara menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan banyak data yang ada. Dapat diketahui bahwa mean Pendapatan Asli Daerah sebesar 522.910,09 Dana Alokasi Umum sebesar 10.16206,98 dan Belanja Modal sebesar 433.426,68 .

Berdasarkan tabel 4.1, Std. Deviation merupakan suatu indeks yang menggambarkan sebaran data terhadap rata-ratanya. Dapat diketahui nilai Std. Deviation Pendapatan Asli Daerah sebesar 512.336,556 Dana Alokasi Umum sebesar 450.303,993 dan Belanja Modal sebesar 360.528,313.

1. **Uji Asumsi Klasik**
	1. **Uji Normalitas**

 **Tabel 4.2**

**Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Unstandardized Residual |
| N | 108 |
| Normal Parametersa,b | Mean | .0000000 |
| Std. Deviation | 175914.19240420 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .088 |
| Positive | .088 |
| Negative | -.075 |
| Test Statistic | .088 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .039c |
| a. Test distribution is Normal. |
| b. Calculated from data. |
| c. Lilliefors Significance Correction. |

 Sumber : Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Melihat hasil dari tabel diatas, hasil menunjukkan nilai signifikansi tidak berdistribusi normal. Sehingga data dalam penelitian ini di harus di *outlier. Outlier* adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim. Data *outlier* akibat pengubahan data sebanyak 1, sehingga data yang tersisa dan dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 107. Berikut merupakan hasil uji normalitas setelah data di *outlier* :

**Tabel 4.3**

**Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Unstandardized Residual |
| N | 107 |
| Normal Parametersa,b | Mean | ,0000000 |
| Std. Deviation | 170.561,42850074 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,085 |
| Positive | ,085 |
| Negative | -,074 |
| Test Statistic | ,085 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,057c |
| a. Test distribution is Normal. |
| b. Calculated from data. |
| c. Lilliefors Significance Correction. |

 Sumber : Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Berdasarkan tabel 4.3, diketahui nilai Kolmogrov-Smirnov sebesar 0,057 artinya nilai Kolmogrov-Sminornov > 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal dan lolos dari uji normalitas.

* 1. **Uji Multikolinearitas**

 **Tabel 4.4**

**Uji Multikolinieritas**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Collinearity Statistics |
| B | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -78.479,334 |  |  |
| PAD | ,461 | ,705 | 1,418 |
| DAU | ,267 | ,705 | 1,418 |
| a. Dependent Variable: BM |

Sumber : Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum memiliki angka *Variance Inflation Factors (VIF)* di bawah 10 dengan angka *Tolerance* yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dan lolos uji multikolinearitas.

* 1. **Uji Heteroskedastisitas**

 **Tabel 4.5**

**Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser**

**Coefficientsa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 109.139,027 | 27.113,915 |  | 4,025 | ,000 |
| PAD | ,046 | ,025 | ,209 | 1,828 | ,070 |
| DAU | -,007 | ,029 | -,027 | -,237 | ,813 |
| a. Dependent Variable: ABS\_RES4 |

Sumber : Hasil data SPSS yang diolah sendiri

 Berdasarkan tabel 4.5, diketahui bahwa seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum memiliki angka taraf signifikansi diatas 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas dan lolos dari uji heteroskedastisitas.

* 1. **Uji Autokorelasi**

**Tabel 4.6**

**Uji Autokorelasi**

|  |
| --- |
| **Model Summaryb** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .881a | ,776 | ,772 | 172.193,632 | 1,814 |
| a. Predictors: (Constant), DAU, PAD |
| b. Dependent Variable: BM |

Sumber : Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Melihat hasil dari tabel diatas, diketahui bahwa jumlah data 107 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2), maka dari tabel *Durbin Watson* akan didapatkan nilai dU sebesar 1,7231 dan dL sebesar 1,6470. Nilai Durbin Watson (DW) nya sebesar 1,814. data tidak dikatakan­ tidak terjadi autokorelasi apaabila DW terletak diantara dU<DW<4-dU yaitu 1,7231<1,814<2,2769 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala autokorelasi dan lolos dari uji autokorelasi.

1. **Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 4.7**

**Analisis Regresi Linier Berganda**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | -78.479,334 | 41.452,245 |  | -1,893 | ,061 |
| PAD | ,461 | ,039 | ,655 | 11,848 | ,000 |
| DAU | ,267 | ,044 | ,333 | 6,031 | ,000 |
| a. Dependent Variable: BM |

Sumber : Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Dari hasil analisis regresi linier berganda diatas, maka model persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Y = -78.479,334 + 0,461 X1 + 0,267 X2 + e

Model regresi tersebut bermakna bahwa nilai constant yaitu sebesar -78479.334 , hal ini berarti bahwa nilai variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) bernilai nol atau tidak mengalami penaikan atau penurunan, maka nilai Belanja Modal tidak ada artinya

Variabel Pendapatan Asli daerah dengan nilai koefisien 0,461 menunjukkan bahwa apabila nilai Pendapatan Asli Daerah meningkat 1% maka nilai Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,461. Variabel Dana Alokasi Umum dengan nilai koefisien 0,267 menunjukkan bahwa apabila nilai Dana Alokasi Umum meningkat 1% maka nilai Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,267.

1. **Uji Signifikansi**
2. **Uji Parsial (t)**

**Tabel 4.8**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | -78.479,334 | 41.452,245 |  | -1,893 | ,061 |
| PAD | ,461 | ,039 | ,655 | 11,848 | ,000 |
| DAU | ,267 | ,044 | ,333 | 6,031 | ,000 |
| 1. Dependent Variable: BM
 |

**Uji Parsial (t)**

Sumber : Hasil data SPSS yang diolah sendiri

 Berdasarkan Tabel 4.8, dapat disimpulkan bahwa hasil uji t untuk H1 diperoleh nilai koefisien regesi sebesar 0,461 dan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang artinya bahwa H1 diterima sehingga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

 Berdasarkan Tabel 4.8, dapat disimpulkan hasil bahwa uji t untuk H2 diperoleh nilai koefisien regesi sebesar 0,267 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi variabel Dana Alokasi Umum menunjukan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang artinya bahwa H2 diterima sehingga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

1. **Uji F**

**Tabel 4.9**

|  |
| --- |
| **ANOVAa** |
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 10.694.283.121.474,512 | 2 | 5.347.141.560.737,256 | 180,338 | ,000b |
| Residual | 3.083.667.294.574,680 | 104 | 29.650.647.063,218 |  |  |
| Total | 13.777.950.416.049,191 | 106 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: BM |

**Simultan (Uji-F)**

b.Predictors: (Constant), DAU, PAD

 Sumber : Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Berdasarkan tabel 4.9, dapat disimpulkan bahwa hasil uji F diatas untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum yang mempunyai nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang artinya H3 diterima maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

1. **Pembahasan**
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

 Berdasarkan dari hasil analisis dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis pertama diterima. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Achmad dkk (2016) memberikan hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat memberi sedikit acuan bahwa Pendapatan Asli Dearah sangat berperan penting dalam pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu daerah hendaknya lebih terpacu lagi untuk memanfaatkan sumber daya daerah untuk dapat digunakan dalam rangka kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat memberi keleluasaan kepada daerah tersebut untuk mengalokasikan ke kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan dareh terutama pembangunan infrasturktur. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas prekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian (Putro dan Pamudji, 2011). Dari peningkatan produktivitas perekonomian akan memberi dampak positif pada peningkatan pendapatan daerah tersebut.

 Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, yang digunakan dalam meningkatkan infrastruktur daerah.

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

 Berdasarkan dari hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis kedua diterima. Hal ini berarti semakin besar Dana Alokasi Umum maka semakin besar pula Belanja Modal pada kebutuhan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Variabel DAU berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal (Putro, 2011). Semakin tinggi DAU yang diterima, semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya terutama untuk meningkatkan pelayanan publik. Meskipun otonomi daerah telat diberlakukan sejak lama, namun kenyataannya masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang masih menggan

tungkan sumber pendanaan pemerintah daerahnya pada dana perimbangan (dana transfer dari Pemerintah Pusat). Besar nilai DAU dipastikan akan menambah jumlah belanja modal Pemerintah Daerah. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian Sugiarthi dan Supadmi (2014) di Bali, Ardhani (2011) di Jawa Tengah, Solikin (2009) di Jawa Barat dan Tuasikal (2008) di Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengatakan variabel DAU berpengaruh pada belanja modal. semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat, kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU), secara simultan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan dari hasil analisis dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama dapat meningkatkan besarnya Belanja Modal daerah. Belanja Modal digunakan untuk melakukan pembangunan di daerah sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Meningkatnya pembangunan di daerah meliputi sarana dan prasarana, dapat menunjang kegiatan perekonomian bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kegiatan perekonomian, akan mengakibatkan meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatnya pendapatan daerah melalui PAD.

 Hal ini mengindikasikan bahwa pembelanjaan aset tetap yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh dari Dana Alokasi Umum, alokasi belanja modal yang dilakukan oleh daerah sangat dipengaruhi oleh luas daerah itu sendiri. Melihat adanya pengaruh terhadap semua variabel diatas, pemerintah diharapkan dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya dengan cara mengoptimalkan kinerja keuangan yang ada, ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat untuk memajukan perekonomian setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal.
4. **Saran**

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti penerimaan pembiayaan pada APBD atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya, maupun variabel non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi. karena tidak menutup kemungkinan bahwa dengan penelitian yang mencakup lebih banyak variabel akan dapat menghasilkan hasil kesimpulan yang lebih baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul, Halim. 2003. *Analisi Investasi*. Edisi Pertama. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.

Abdul, Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta, Salemba Empat.

Abdullah, Ridwan. (2013). *Inovasi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara

Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi, Agustus 2006.

Adiwiyana, priya. 2012.*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*.Universitas Diponegoro.Semarang.

Allen, Richard & Tommasi, Danniel. (2001). *Managing Public Expenditure : A Reference Book for Transition Countries*. Paris: OECD.

Angelia, Yuki. 2010. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi Ilmu Ekonomi dan studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Dipenegoro.

Aprizay, Yudi Satria, Darwanis dan Muhammad Arfan. 2014.*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.Vol.3 No. 1, Februari. Pages 140-149.*

Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. *”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kubapten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”.* Simposium Nasional Akuntansi 17 Lombok24-27 September 2014.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar.* Jakarta: Erlangga.

Darise, Nurlan. 2006. “*Pengelolaan Keuanngan Daerah*”. Indexs.

Darwanto, dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X, Makassar.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. *Data Keuangan Daerah.* ([www.djpk.depkeu.go](http://www.djpk.depkeu.go)) .Diakses tanggal 05 Maret 2019. Pada Pukul 09.00 WIB.

Erlina, Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Penerbit Brama Ardian

Ernayani, Rihfenti. 2017. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah (studi kasus pada 14 Kabupaten?Kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2009-2013)”*. Jurnal Sosial Humanior dan Pendidikan Vol. 1 No.1. ISSN 2580-5398.

Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Kusnandar & Dodik Siswantoro. 2012*. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Universitas Indonesia.Jakarat

Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undamg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undamg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Dana Perimbangan*.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.

Nuarisa, Sheila Ardhian. 2012. *Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Universitas Negeri Semarang, Indonesia.Accounting Analysis Journal 1 (3) (2013).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 *Tentang Anggaran Direktorat Jendral Otonomi Daerah.*

Purwanto, Fiona Puspita Devi. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Sugiarthi dan Supadmi. 2014. *Pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi*. Ejurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 :477-495.

Sugiyono. (2007). *Statistik Untuk Penelitian*. Banding: CV. Alfabeta

Susanti,Susi., dan Fahlevi, Heru. 2016. *Pengaruh PAD, DAU, dan DBH Pada Belanja Modal*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 1(1), hal.183-191.

Syaiful. 2006. “*Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan”*. Artikel

Tambunan. Tulus. 2006 .*Upaya-upaya meningatkan Daya Saing Daerah*. [www.kardin-indonesia.or.id](http://www.kardin-indonesia.or.id)

Wandira, Arbie Gugus. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Universitas Negeri Semarang, Indonesia.Accounting Analysis Journal 1 (3) (2013).

Wong, John D. 2004. *The Fiscal Impact Of Economic Growth and Development on Local Government Capacity, Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management.* Fall. 16.3.799-816.